

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN THE BANDUNG REJOSARI VILLAGE OFFICE SUKUN DISTRICT, MALANG CITY

Yosef Kanda Kendu¹ Taufiq Soeltanto²

Malang College of Public Administration

Department of Public Administration

Street. Baiduri Bulan No. 1 (D/H Tlogomas 35) Kota Malang-Jawa Timur

Telp. (0341) 553401 Fax. (0341) 562768

E-mail:yosefkanda31@gmail.com

Abstract

This search aims to analyze the sub-district government's occupation in addition to creating environmental assistance in Bandungrejosari District, Sukun Area, Malang City. Contextual investigative research is a type of research that uses the following investigative methods: examination of subjective explanations using interviews, perceptions, and writing down survey information using various techniques.

Judging from the results of the examination shown by excerpts from several meetings, that is what can be seen; The Bandungrejosari District Government has an important role in the areas of finance, welfare and local government assistance, especially in Bandungrejosari District. The final results that can be taken from the continued impact of this exploration are; Bandungrejosari District Government personnel who generally work closely with related partners such as the Head of the Regional Welfare Focus, Community Health Centers, Regional Pioneers play an important role in working on local government assistance, especially as facilitators. Malang Regional Government and supports community strengthening programs, considering that the sub-district government is the government that knows the least about what is happening to its citizens, especially in the social-social and financial and welfare fields and Bandungrejosari Regency. group of people.

Keywords: *Role of Government, Community Welfare*

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KANTOR KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Yosef Kanda Kendu¹ Taufiq Soeltanto²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Malang

Jurusan Administrasi Publik

Jalan. Baiduri Bulan No. 1 (D/H Tlogomas 35) Kota Malang-Jawa Timur

Telp. (0341) 553401 Fax. (0341) 562768

E-mail:yosefkanda31@gmail.com

Abstrak

Penelusuran ini bertujuan untuk menganalisis okupasi pemerintah kecamatan selain menciptakan bantuan lingkungan di Kecamatan Bandungrejosari, Kawasan Sukun, Kota Malang. Penelitian investigasi kontekstual adalah jenis penelitian yang menggunakan metode penyelidikan berikut: pemeriksaan penjelasan subjektif dengan menggunakan wawancara, persepsi, dan penulisan informasi survei dengan berbagai teknik.

Dilihat dari hasil pemeriksaan yang ditunjukkan oleh petikan beberapa pertemuan, hal itulah yang terlihat; Pemerintahan Kecamatan Bandungrejosari mempunyai peranan penting dalam bidang keuangan, kesejahteraan dan bantuan pemerintah daerah setempat, khususnya di Kecamatan Bandungrejosari. Hasil akhir yang dapat diambil dari dampak lanjutan eksplorasi ini adalah; Tenaga Pemerintah Kecamatan Bandungrejosari yang pada umumnya bekerja sama dengan mitra-mitra terkait seperti Kepala Fokus Kesejahteraan Daerah, Puskesmas, Pelopor Daerah memegang peranan penting dalam menggarap bantuan pemerintah daerah setempat, khususnya sebagai fasilitator. Pemerintah Daerah Malang dan mendukung program penguatan masyarakat, mengingat pemerintah kecamatan merupakan pemerintah yang paling sedikit mengetahui apa yang terjadi pada warganya, khususnya di bidang sosial-sosial dan keuangan serta kesejahteraan dan Kabupaten Bandungrejosari. kelompok orang.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia hendaknya dapat mengajukan tuntutan perbaikan-perbaikan yang bersifat umum di seluruh penjuru tanah air, mengingat penyesuaian acara-acara terdekat yang merupakan bagian mendasar dari perubahan acara-acara terbuka mencakup seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan, tentunya membutuhkan afiliasi administrasi yang dapat mengikuti perkembangan terkini. Implementasinya dapat dikoordinasikan dengan daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola kemajuan pelatihan mereka sendiri sejalan dengan fokusnya pada peningkatan masyarakat.

Pelaksanaan promosi yang dilakukan terhadap bantuan pemerintah daerah umumnya dilakukan ke daerah-daerah terpencil sesuai dengan negara bagian masing-masing kabupaten, sehingga negara memberikan peluang terjadinya transparansi dan membuka pintu bagi daerah untuk mencapai otonomi penuh. Kemajuan masyarakat pada hakikatnya adalah kemajuan seutuhnya

individu Indonesia dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “usaha kemajuan” adalah upaya untuk “menyesuaikan” atau mengupayakan cara hidup masyarakat sebagai subjek dan objek perbaikan, serta “menjalin persahabatan dan keseimbangan dalam satu solidaritas” di seluruh wilayah. Kondisi Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah dan daerah-daerah dipisahkan menjadi daerah-daerah yang tidak terlalu kompleks, khususnya pedoman/jaringan metropolitan, sub-daerah dan masyarakat/sub-lokal perkotaan.

Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan harus dilakukan secara merata di seluruh bidang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kebanyakan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu kehidupan yang tidak memenuhi pedoman kesadaran

orang lain atau belum sejahtera. Ada banyak keluarga yang tidak dapat menyekolahkan anaknya karena masalah keuangan; Faktanya, masih banyak keluarga yang anggotanya menganggur dan tidak mampu membayar tagihan.

Keluarga-keluarga yang belum sejahtera ini hanya menerima kenyataan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan berupa jenis pekerjaan yang benar-benar mereka perlukan, guna memenuhi kebutuhan ramah tamah mereka sehari-hari. Salah satunya adalah iklim sub-provinsi yang memiliki keterlibatan paling sedikit dalam struktur kekuasaan publik. Kedudukan walikota sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan keluarganya, oleh karena itu hendaknya walikota adalah orang yang benar-benar selalu memperhatikan nasib penghuninya, bukan sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan atau jabatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan, mengingat seorang kepala kota berhubungan langsung dengan iklim.

Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan harus dilakukan secara berkeadilan di seluruh bidang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kebanyakan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yang kehidupannya belum memenuhi standar yang baik atau belum sejahtera karena kesulitan keuangan, banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anak mereka; Faktanya, banyak keluarga yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena kurangnya keterampilan dan kesempatan kerja.

Keluarga-keluarga yang belum sejahtera ini hanya berharap pemerintah memberikan bantuan berupa pekerjaan yang benar-benar mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daerah sub-lokal, yang memiliki cakupan terkecil dalam struktur otoritas publik, adalah salah satunya. Tugas Lurah sangat penting dalam membantu pemerintah dan membantu masyarakat oleh pemerintah, oleh karena itu Lurah haruslah orang yang benar-benar memikirkan nasib warganya, bukan

sebagai batu loncatan untuk mencapai kedudukan atau kedudukan yang lebih tinggi dalam pemerintahan, pada tingkat pemerintahan. dengan alasan bahwa seorang kepala kota mempunyai hubungan langsung dengan lingkungannya.

Ujian terbesar yang harus dihadapi adalah membebaskan manusia dari kemelaratan, kelambanan, keterbelakangan dan belenggu yang menghambat kemajuan kemajuan bangsa. Permasalahan di atas merupakan permasalahan sosial yang pada umumnya muncul dalam kehidupan individu. Kita harus mengatasi kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara bersama-sama, karena hal ini berada di luar kemungkinan bagi para spesialis publik untuk mengatasi tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di negara ini tanpa bantuan dan dukungan dari daerah dan seluruh penjuru negeri/negara.

Kita perlu bekerja sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi setiap orang, dan saya

berpendapat bahwa otoritas publik tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di suatu negara saat ini tanpa bantuan dan kerja sama. dari lingkungan di seluruh negeri. Partisipasi provinsi dalam upaya bantuan pemerintah dilakukan secara institusional dan terstruktur dan lebih jelas dibandingkan dengan upaya pemerintah, dengan penekanan pada pelaksanaan kapasitas manajerial dan regulasi sehingga daerah menjadi tumpuan utama dalam mengatasi permasalahan bantuan pemerintah dalam situasi yang sedang berlangsung.

Pedoman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara merupakan pedoman yang mengkoordinasikan asas-asas besar pemerintahan yang memperhatikan ketahanan komponen pemerintahan itu sendiri. Sistem berbasis suara dan kebebasan bersama dapat diperkuat, kesejahteraan finansial dan persatuan sosial dapat diperkuat, kemiskinan dapat dikurangi, keamanan ekologis dapat ditingkatkan dan pemanfaatan aset-aset normal secara cerdas dapat mengembangkan kepercayaan pada

pemerintah dan implementasi kebijakan.

Sebagai penggerak komunitas bantuan publik, masyarakat sub-lokal harus memberikan dukungan luar biasa kepada warga yang memenuhi semua persyaratan terkait organisasi. Segala urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB, hingga urusan perkawinan atau perpisahan memerlukan pengakuan dari instansi pemerintah sehingga kehidupan dan kehidupan di ruang publik menjadi lebih tenang karena semuanya mempunyai kekuatan pedoman.

Subwilayah adalah unit provinsi yang mempunyai tugas utama melakukan beberapa urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, subdaerah dalam pemerintahan teritorial dapat melayani kabupaten, menjalankan pemerintahan provinsi, memberdayakan penguatan daerah sebagai aparatur pemerintah yang menguasai suatu wilayah secara baik dan aman serta peningkatan sasaran juga dikembangkan.

Menciptakan dan menjadi bahagia adalah tujuan manusia. Orang

melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bagian utama dari kemakmuran untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, banyak pula variabel pendukung yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jumlah bantuan eksternal pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dapat diperkirakan berdasarkan seberapa baik kehidupan masyarakat; Namun derajat kebahagiaan tersebut tidak dapat diperkirakan secara riil karena bersifat relatif dan mempunyai arti terkait dengan bantuan pemerintah.

Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Bandungregosari, Kawasan Sukun, Kota Malang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk mengawasi permasalahan bantuan pemerintah daerah yang meliputi 6 kecamatan, khususnya Kota Bandungregosari yang merupakan pemerintahan tingkat kabupaten utama, antara lain 8 Badan Pengatur Kota yang berada di bawah Pemerintah Daerah Sukun. Sementara itu, ada kekhasan yang sangat menarik untuk dikaji, seperti halnya upaya Pemerintah Kota Bandungregosari

dalam menggarap bantuan pemerintah daerah berdasarkan persepsi penciptanya. Karena kearifan tersebut, diketahui masih ada segelintir warga Kota Bandungregjosari yang belum bisa ikut dalam kerangka bantuan pemerintah tersebut.

Permasalahan yang ada menurut daerah antara lain kurangnya pelayanan manajerial dan sosial, kurangnya sandang, pangan dan rumah aman, kurangnya data, kemampuan dan permasalahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah lingkungan di wilayah Bandungregjosari belum terdistribusi secara merata. Jaringan yang ada di wilayah Kabupaten Bandungregjosri tertentu memiliki tingkat kepentingan yang baik, namun apakah bantuan pemerintah ini didapat karena upaya menjalankan program yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Bandungregjosari? Menanggulangi permasalahan bantuan pemerintah bukan hanya sekedar kewajiban pemerintah setempat, namun merupakan kewajiban bersama antara Pemerintah Kecamatan

Bandungregjosari dan masyarakat setempat.

Mengingat permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa sebaiknya dilakukan eksplorasi dengan judul; Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Desa Bandungregjosari Kecamatan Sukun Kota Malang Permasalahan yang dirinci dalam pendalaman kali ini adalah; (1) Apa peran pemerintah dalam mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah di Kota Bandungregjosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang?; (2) Apa sajakah yang menjadi penghambat peran otoritas publik dalam mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah di Kota Bandungregjosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

Sebagaimana diungkapkan oleh Talijuduhu, (2013) kewajiban dan kemampuan otoritas publik sebagai; Beberapa faktor mempengaruhi perencanaan pemerintah dan upaya perbaikan daerah; yang pertama adalah pandangan mengenai pelaksanaan

wilayah setempat dan permasalahan peraturan kewilayahan. Ada negara-negara yang menawarkan peluang luar biasa bagi masyarakat umum untuk membangun masyarakat sehingga para profesional terbuka tidak boleh terlalu mencampuri pola pikir masyarakat.

Sebelumnya, dalam konstruksi yang tidak masuk akal, hal ini dianut oleh mentalitas sosial Free Venture, namun ada juga negara yang cara pandangnya mengharuskan negara dan pemerintahannya memimpin dan mengarahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan negaranya, misalnya saja bersikap moderat dalam menjalankan pemerintahan. perspektif masalah pemerintahan. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa spesialis publik sebagai presiden harus mencari keuntungan dan keadilan bagi masyarakat tergantung pada situasi yang akan dihadapi namun pada saat yang sama berpusat pada kepentingan perekonomian yang lemah. Rasyid (dalam Agus, 2011) membagi kapabilitas pemerintah menjadi empat bagian, yaitu; Kemampuan administrasi (bantuan publik); Peningkatan kemampuan

(adancement); Mengaktifkan kemampuan dan kemampuan administratif

Dalam arti luas dari definisi di atas, pemerintah berarti segala sesuatu yang dilakukan negara untuk membantu rakyatnya dan melindungi kepentingan sebenarnya. Hal ini tidak sama dengan pemerintahan yang hanya memenuhi tanggung jawab para pemimpinnya namun juga mencakup berbagai permasalahan bisnis, seperti undang-undang dan peraturan. Pakar publik dalam hal ini mencakup seluruh urusan kenegaraan. Dalam Undang-Undang tentang Standarisasi Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “pemerintah provinsi” adalah perseorangan DPRD dan kepala daerah secara keseluruhan seperti wakil pimpinan, pejabat, dan walikota. Kedudukan anggota DPRD identik dengan kekuasaan, dimana pimpinan biasa menggerakkan yayasan resmi dan DPRD bekerja di bidang kekuasaan. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (PERDA) memerlukan upaya yang terkoordinasi

antara anggota DPRD dan kepala daerah. Tugas utama kepala daerah sebagai salah satu komponen pemerintahan teritorial adalah memimpin pelaksanaan dan mengambil alih kepemilikan penuh atas jalannya pemerintahan bersama.

Berikut tugas dan kemampuan Tjokroamidjojo (2013) terhadap pemerintah: Rencana dan upaya pemerintah untuk lebih mengembangkan daerah bertumpu pada beberapa hal, yang pertama adalah; perspektif tentang kegiatan wilayah setempat dan masalah peraturan wilayah. Ada negara-negara yang memberikan keterbukaan luar biasa kepada masyarakat dari seluruh masyarakat untuk membangun masyarakat sehingga para pakar publik tidak boleh terlalu ikut campur dalam pola pikir masyarakat.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Jamasy (2004) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “suatu lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan kegiatan terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga swasta maupun publik dengan tujuan mencegah, mengatasi, atau

memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan komunitas.” Sesuai Pedoman Nomor 11 Tahun 2009, bantuan sosial pemerintah adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan materil, dunia lain, dan sosial masyarakat agar mereka dapat hidup berkeadilan dan mempunyai keputusan untuk membina diri, sehingga dapat melakukan kapasitas sosialnya, karena belum mendapat administrasi sosial dari negara, masih ada warga yang kebutuhan mendasarnya belum terpenuhi secara memadai, terbukti dengan masih adanya permasalahan bantuan sosial pemerintah

Akibatnya, masih ada warga yang kesulitan menggunakan keterampilan sosialnya dan kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari dengan anggun. Gagasan bantuan pemerintah menurut Sarman dan Sajogjo (2000) dapat dibentuk sama pentingnya dengan gagasan kebanggaan manusia yang harus terlihat dari empat penanda, yaitu: (1) rasa aman dan selamat; 2) kesejahteraan; 3) kebebasan; dan 4)

identitas diri. Menurut Schneiderman, (2008) mengemukakan tiga sasaran utama dalam struktur bantuan sosial pemerintah yang diakui dalam semua program bantuan sosial pemerintah, yaitu; dukungan struktur, pengamatan sistem dan perubahan struktur

- 1) Pemeliharaan Sistem; Menjaga keseimbangan atau koherensi praktik, nilai, dan aturan yang diterima di arena publik, misalnya makna makna dan alasan hidup, inspirasi individu untuk daya tahan kelompok, standar yang mengarahkan bagaimana generasi muda, remaja, orang dewasa dan hal-hal lama yang harus dilakukan, pekerjaan orang-orang. perempuan, dan standar-standar yang mengawasi bagaimana perjuangan diselesaikan di arena publik, dan lain-lain.
- 2) Sistem Persepsi; Pengelolaan yang sangat luar biasa atas cara berperilaku yang tidak pantas atau salah dalam kualitas sosial. Pemerintahan sosial membantu kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi; Meningkatkan

kapasitas menjangkau kantor yang ada bagi kelompok di tempat umum yang menunjukkan penyimpangan perilaku, seperti pertemuan pemuda dan pertemuan lainnya di tempat umum, dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan seperti gaji dan sosialisasi.

Penyesuaian struktur membawa perubahan ke arah pengembangan sistem yang lebih membumi di wilayah setempat. Perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kesejahteraan sosial untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam pengambilan keputusan, mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik, dan menggunakan struktur peluang secara adil.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penyelidikan yang digunakan adalah pemeriksaan emosi, khususnya data yang disampaikan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan sesuai syarat yang berkaitan dengan kewajiban otoritas publik dalam

melakukan bantuan perseorangan pemerintah Kota Bandungregosari, Daerah Sukun, Kota Malang. Eksplorasi ilustratif subyektif merupakan suatu jenis pemeriksaan yang menggambarkan kekhasan yang terjadi pada objek eksplorasi selama eksplorasi. Sistem pengumpulan data melalui pengumpulan, wawasan dan ujian tertulis.

Data yang telah dikumpulkan oleh para ahli ditangani dan dianalisis dengan memasukkan sistem ilustratif emosional, misalnya menentukan data, memasukkan data dan mengejar pilihan menggunakan siklus yang membosankan dan mencapai tujuan akhir dengan menggunakan pemikiran yang terorganisir, kemudian, pada saat itu, Pembuat membaginya menjadi berbagai informasi yang menggambarkan area lokal proyek dalam organisasi. pengembangan bantuan pemerintah terdekat wilayah Kota Bandungregosari, Wilayah Sukun, Kota Malang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil peninjauan dengan beberapa responden dan pertemuan-pertemuan tersebut, diperoleh data-data penting yang dapat digambarkan atau dipahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai upaya pemerintah dalam menciptakan bantuan tambahan pemerintah daerah, khususnya di Kota Bandungregosari. . Kawasan Sukun Kota Malang.

Berdasarkan data Bupati, pada tahun 2020 terdapat 30.441 jiwa yang tinggal di wilayah Bandungregosari, menurut BPS. Untuk melakukan koordinasi hingga ke tingkat akar rumput, wilayah Bandungregosari secara bertahap dimekarkan menjadi 13 RW dan 133 RT, sehingga jumlah RW dan RT yang ada saat ini mutlak sesuai dengan pelaksanaan program kerja otoritas publik, yang salah satunya terkoneksi. dengan pengaturan bantuan pemerintah, keluarga yang dianiaya, dan sebagainya

Berniat menggarap bantuan pemerintah kelompok masyarakat Bandungregosari. Dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pengumpulan tersebut, diperoleh data bahwa Inisiatif Kota dan staf juga telah

berupaya untuk menjamin bahwa wilayah tersebut juga sejahtera. Melalui PKK diadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat mulai dari persiapan produksi barang-barang UMKM, bundling hingga pengembangan online untuk pertukaran langsung di pusat komersial plcae. Memang sulit, tapi percayalah, dengan asumsi hal ini dilakukan dengan andal dan andal, masalah yang awalnya merepotkan akan teratasi dengan baik. Pengaturannya ada yang diadakan di Balai Kota, kadang juga di Pintu Masuk Kantor RW (tergantung jumlah orang yang ikut serta).

Kota Bandungregjosari tidak hanya fokus pada kemampuan fundamental wilayahnya saja, namun juga kesehatan warganya. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan melakukan penghambatan terhadap pemerintah melalui Bandungregjosari. Pemerintah kota metropolitan membantu Administrasi Bantuan Pemerintah, khususnya Pusat Bantuan Pemerintah Janti Kota Malang. Selain itu juga membantu fasilitas kesehatan yang letaknya tidak

terlalu jauh, sehingga dengan harapan jika ada masyarakat yang membutuhkan bisa dengan mudah dijangkau tanpa memikirkan jarak yang harus ditempuh. Kota Bandungregjosari bekerjasama dengan Puskesmas hingga Posyandu yang diadakan secara rutin dan berpusat pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang sedang mengandung atau sekedar kontrol untuk memeriksakan kesehatannya untuk mengetahui apakah tekanan darah dan denyut nadinya normal. Serta fokus pada kesejahteraan kantor.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penilaian dengan beberapa responden dan pertemuan-pertemuan tersebut, diperoleh data-data penting yang dapat digambarkan dan dipahami secara top to bottom dan mendalam mengenai upaya pemerintah dalam menangani bantuan perorangan khususnya di Kota Bandugregjosari. Sukun Lokal Kota Malang.

Berdasarkan data Top Kota, jumlah penduduk wilayah Bandungregjosari pada tahun 2020 sebanyak 30.441 jiwa per BPS.

Program kerja pemerintah tentunya akan lebih mudah dilaksanakan jika salah satu program yang ada seperti peta kesehatan, keluarga prasejahtera dan topik lainnya dimanfaatkan.

Tujuannya adalah untuk berupaya memberikan bantuan pemerintah kepada individu di wilayah Bandungregosari, dengan mempertimbangkan dampak pertemuan dan data yang diperoleh; Pak Lurah dan jajarannya juga telah berupaya agar daerah tersebut dapat meraih kesuksesan yang langgeng, melalui Ibu PKK, mereka telah membantu kegiatan-kegiatan berharga melalui pembuatan dasar pembuatan barang-barang UMKM, pengemasan, pergantian acara secara online dan pengecekan bursa di pasar plcae. Memang sulit, tapi percayalah, dengan asumsi hal ini dilakukan dengan andal dan andal, masalah yang awalnya merepotkan akan teratasi dengan baik. Pengaturannya ada yang diadakan di Balai Kota, kadang juga di Pintu Masuk Kantor RW (tergantung jumlah orang yang ikut serta).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandungregosari

dengan dinas terkait, salah satunya terkait dengan penghambatan, menunjukkan bahwa pemerintah melalui Pemerintah Kota Bandungregosari bekerja sama dengan Dinas Kesejahteraan, khususnya Balai Kesejahteraan Janti di Kota Malang. Hal ini seharusnya terlihat dari upaya yang dilakukan Kota Bandungregosari. Selain itu, ia juga memberikan bantuan di klinik darurat terdekat dengan harapan mereka yang membutuhkan bisa langsung menghubunginya tanpa harus memikirkan waktu perjalanan. Selain fokus pada administrasi kesejahteraan, Pemda Bandungregosari juga bekerja sama dengan pusat kesejahteraan dan Posyandu yang dilakukan sebulan sekali, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil atau pada dasarnya kontrol untuk memeriksakan kesehatannya apapun yang terjadi. apakah detak dan denyut nadinya khas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengingat konsekuensi dari penilaian tersebut, tampaknya ada pemikiran; Organisasi masyarakat tersebut telah membuat program kerja

dengan nama SEHAT POKJA dan memisahkan setiap tugas kepada setiap penanggung jawab mulai dari rekan hingga SIE dengan tujuan berkumpul menjadi kelompok masyarakat Bandungregjosari. Perhatian utama dalam Temu Kerja Sehat adalah terkait dengan bantuan pemerintah. Selain sebagai penentu tugas kerja dan program kerja, mereka juga menjadi contoh perilaku bagi lingkungan sekitar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan besar dalam mengurangi bantuan pemerintah daerah, terutama sebagai fasilitator program pemerintah daerah dan penguatan daerah, karena pemerintah daerah merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah. siapa yang tahu kondisi sebenarnya masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan Kota Bandungregjosari dalam mendorong bantuan pemerintah kepada warganya adalah transparansi dan kepedulian masyarakat Kota Bandungregjosari Kota Malang. Kolaborasi antar organisasi yang sudah maju juga tidak kalah pentingnya, sehingga jika memang diperlukan bisa

melalui jalur telepon dibandingkan diatur secara berlebihan.

Saran

Berdasarkan hasil penilaian, secara umum akan diusulkan bahwa; Sangat penting untuk membuat atau menambahkan data sasaran atau sasaran setiap proker dalam bentuk angka sehingga dapat diketahui tingkat atau level dari setiap proker yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. M. B. 2011. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Bandungregjosari Kecamatan Sukun Kota Malang.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika Mizan.
- Ndraha, Talijuduhu. 1999. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarman, Mukhtar dan Sajogjo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara.